

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir ekonomi global menunjukkan pergeseran nilai, dari fokus pada keuntungan finansial menuju ke arah keberlanjutan jangka panjang. Dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan menuntut perusahaan untuk lebih adaptif dalam merespons perubahan. Hal ini memunculkan paradigma baru, di mana praktik bisnis tidak cukup jika hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan masyarakat.

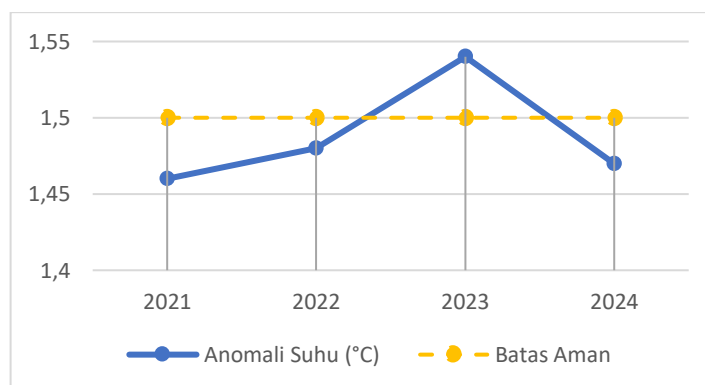
Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca, pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi dan industrialisasi tanpa kendali telah mengganggu keseimbangan iklim bumi dan memicu naiknya suhu global, pencairan es kutub, serta peningkatan permukaan laut dan frekuensi bencana alam. Dampaknya meluas mulai dari gangguan terhadap sistem ekonomi, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga stabilitas sosial di berbagai wilayah.² Kondisi ini menegaskan bahwa krisis iklim memerlukan tanggapan serius dari seluruh sektor, termasuk dunia usaha.

Untuk memperkuat pemahaman terhadap kondisi krisis iklim saat ini, tren anomali suhu global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kenaikan

² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Sixth Assessment Report: Synthesis Report – Summary for Policymakers* (2023), diakses 23 Juni 2025, <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>.

signifikan. Anomali suhu merupakan selisih antara suhu rata-rata tahunan dengan suhu acuan historis pada masa pra-industri, dimana nilai positif menunjukkan peningkatan suhu bumi dibandingkan dengan kondisi iklim normal.³ Berdasarkan data terkini, suhu rata-rata bumi terus mengalami peningkatan dan bahkan telah melampaui batas aman yang ditetapkan secara global. Kondisi ini menegaskan bahwa risiko keberlanjutan tidak lagi sekedar ancaman jangka panjang, melainkan sebuah realitas yang memerlukan tindakan segera.

Gambar 1. 1 Tren Kenaikan Suhu Global Tahun 2021-2024



Sumber : NASA GISS (GISTEMP)

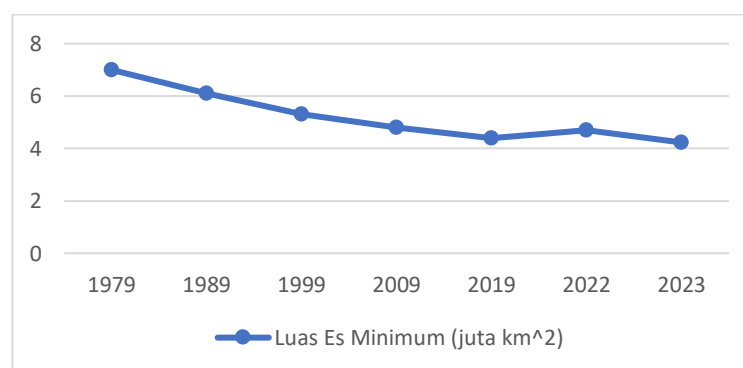
Gambar 1.1 menunjukkan tren anomali suhu global periode 2021-2024. Suhu rata-rata naik +1,46°C pada 2021 menjadi +1,54°C pada 2023, menjadikan tahun tersebut sebagai puncak tertinggi yang menjadikan tahun terpanas dalam pencatatan suhu global secara instrumental. Suhu tersebut berada di atas ambang batas 1,5°C yang ditetapkan dalam *Paris Agreement*, yaitu batas maksimum pemanasan global untuk mencegah krisis iklim yang

³ NASA, *Global Climate Change: Temperature Anomaly* (2024), diakses 23 Juni 2025, <https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature>.

lebih parah. Meskipun sedikit menurun menjadi $+1,47^{\circ}\text{C}$ pada 2024, tingkat pemanasan tetap jauh di atas kondisi historis. Tren ini menunjukkan bahwa krisis iklim telah menjadi ancaman nyata yang memerlukan tanggapan segera, termasuk dari sektor usaha.

Tren pemanasan global yang terus meningkat tersebut juga menimbulkan dampak fisik yang nyata, salah satunya terlihat dari mencairnya es laut di wilayah kutub. Data dari National Snow and Ice Data Center (NSIDC) menunjukkan bahwa ketebalan dan luas es laut Arktik terus menurun selama dua dekade terakhir. Kondisi ini tidak hanya menegaskan percepatan perubahan iklim, tetapi juga berkontribusi terhadap kenaikan permukaan air laut secara global, termasuk di wilayah pesisir Indonesia. Gambar 1.2 memperlihatkan penurunan luas es laut Arktik yang menggambarkan besarnya risiko lingkungan yang kini dihadapi dunia.

Gambar 1. 2 Tren Penurunan Luas Es Laut Arktik (juta km²)



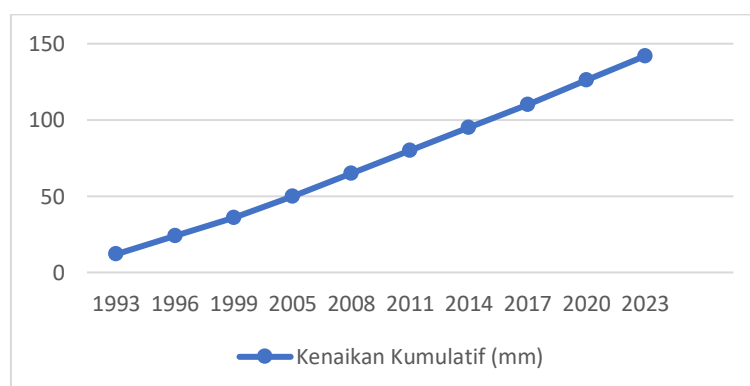
Sumber : National Snow and Ice Data Center (NSIDC)

Pada gambar 1.2 menunjukkan tren penurunan luas es laut Arktik pada bulan september periode 1979 hingga 2023. Dalam dua dekade pertama, luas es menyusut 7,0 juta km² menjadi 4,8 juta km², dipicu oleh meningkatnya suhu

global dan berkurangnya es yang bertahan lebih dari satu musim. Meski sempat mengalami variasi tahunan, tren jangka panjang tetap menurun hingga mencapai 4,23 juta km² pada tahun 2023, yang menjadikan salah satu titik terendah sepanjang pencatatan modern.

Penyusutan luas es laut dan lapisan es di daratan seperti *Greenland* dan Antartika sudah mendorong kenaikan permukaan laut secara global. Dampaknya terasa langsung di wilayah pesisir, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), rata-rata permukaan laut di wilayah Indonesia mengalami kenaikan sekitar 4 mm per tahun selama tiga dekade terakhir, bahkan mencapai 0,8 hingga 1,2 cm per tahun di beberapa wilayah pesisir tropis. Gambar 1.3 menunjukkan tren kenaikan permukaan laut di Indonesia sebagai salah satu indikator nyata krisis iklim.

Gambar 1. 3 Tren Kenaikan Permukaan Laut Indonesia (mm)



Sumber : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Gambar 1.3, menunjukkan tren kenaikan permukaan laut di Indonesia dari tahun 1993 hingga 2023, dengan rata-rata peningkatan sekitar 4mm per tahun. Dimulai dari titik nol pada tahun 1993, permukaan laut terus meningkat secara

bertahap dan mencapai sekitar 80 mm pada 2011. Kenaikan berlanjut hingga 142 mm pada tahun 2023, seiring dengan meningkatnya suhu global dan pencairan es kutub. Dampak dari tren ini mulai terasa di kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan wilayah utara Pulau Jawa, dalam bentuk banjir rob, erosi pantai, dan tekanan terhadap infrastruktur. Data ini menguatkan bahwa perubahan iklim memicu risiko lingkungan yang nyata dan berkelanjutan, serta mendorong perlunya peran aktif sektor usaha dalam merespons isu keberlanjutan melalui pemantauan risiko seperti *ESG Risk Rating*.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi bencana alam, seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan, yang mengganggu sektor pertanian, ketahanan pangan, serta kestabilan sosial-ekonomi di berbagai negara. Selain itu, pencairan es kutub mempercepat pelepasan gas rumah kaca dan menurunkan albedo bumi, sehingga memperparah pemanasan global.⁴ Di Indonesia, kenaikan permukaan laut menyebabkan banjir rob, erosi pantai, dan kerusakan infrastruktur di kawasan pesisir. Menurut BMKG, sekitar 18.000 km wilayah pesisir Indonesia tergolong rawan terhadap risiko perubahan iklim, dengan potensi kerugian ekonomi yang dapat mencapai Rp544 triliun apabila tidak diantisipasi melalui strategi mitigasi yang efektif.⁵ Di sisi lain, pencairan es juga membuka jalur pelayaran baru di wilayah Arktik, seperti *Northern Sea*

⁴ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Climate Change 2021: The Physical Science Basis* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hal. 123–125.

⁵ BMKG, “Indonesia Experiencing Impact of Climate Change,” *Antara News*, 2022, <https://en.antaranews.com/news/218005>.

Route, yang meskipun menawarkan efisiensi logistik, turut memicu risiko geopolitik dan eksploitasi sumber daya secara masif.⁶ Berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman jangka panjang, melainkan krisis nyata yang memerlukan respons strategis, termasuk melalui pengelolaan risiko keberlanjutan oleh sektor usaha.

Seiring meningkatnya isu perubahan iklim dan ketimpangan sosial, berbagai negara serta lembaga internasional mulai mengarahkan kebijakan ekonominya menuju pembangunan berkelanjutan. Secara global, *Paris Agreement* menjadi tonggak penting yang mendorong upaya pembatasan kenaikan suhu bumi dan penerapan strategi keberlanjutan jangka panjang.⁷ Perubahan ini juga memengaruhi sektor bisnis dan keuangan, di mana aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), dan tata kelola (*governance*) kini menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan strategis. Banyak lembaga investasi global juga mulai mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam proses investasi karena diyakini dapat memperkuat ketahanan perusahaan terhadap risiko jangka panjang.

Indonesia juga turut merespon tren global ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan perusahaan jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik menyampaikan laporan keberlanjutan sebagai cerminan

⁶ NOAA Arctic Report Card, "New Arctic Shipping Routes and Geopolitical Risks," 2022, <https://www.arctic.noaa.gov/Report-Card>.

⁷ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), *The Paris Agreement* (2015), diakses 23 Juni 2025, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>.

komitmen terhadap aspek ESG.⁸ Selain itu, OJK menyusun Roadmap Keuangan Keberlanjutan untuk dijadikan panduan strategis dalam membangun ekonomi yang ramah lingkungan.⁹ Bursa Efek Indonesia juga meluncurkan Indeks IDX ESG *Leaders*, yang memuat perusahaan-perusahaan dengan kinerja keberlanjutan unggul berdasarkan penilaian independen.¹⁰ Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif mendorong transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan melalui regulasi, insentif pasar, serta peningkatan transparansi pelaporan perusahaan.

Untuk menghadapi tantangan keberlanjutan, banyak perusahaan mulai menerapkan pendekatan strategis berbasis ESG. Konsep ESG mencakup tiga dimensi utama, yaitu aspek lingkungan seperti pengelolaan emisi, energi dan limbah, aspek sosial seperti hak asasi manusia serta hubungan dengan pekerja dan masyarakat, dan aspek tata kelola yang mencakup struktur manajemen, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan. Awalnya, ESG berkembang untuk merespons tekanan pemangku kepentingan yang menuntut praktik bisnis yang bertanggung jawab, namun kini ESG menjadi indikator non-keuangan yang penting untuk pengambilan keputusan investasi.¹¹

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (2017).

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025), (2021), diakses 23 Juni 2025, <https://ojk.go.id>.

¹⁰ Bursa Efek Indonesia, Panduan Indeks IDX ESG Leaders, (2022), diakses 23 Juni 2025, <https://www.idx.co.id>.

¹¹ Mozaffar Khan, George Serafeim, dan Aaron Yoon, "Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality," *The Accounting Review* 91, no. 6 (2016): 1699, <https://doi.org/10.2308/accr-51383>.

Perkembangan ESG selanjutnya terlihat melalui *ESG risk rating*, yaitu pengukuran kuantitatif terhadap potensi risiko keberlanjutan yang mungkin dihadapi perusahaan. Salah satu lembaga yang menerbitkan penilaian ini adalah *Sustainalytics*, yang menyusun skor ESG berdasarkan eksposur perusahaan terhadap isu keberlanjutan serta efektivitas manajemen dalam mengelola risiko terkait. Penilaian mempertimbangkan faktor industri, bobot materialitas, dan kesiapan manajerial. Semakin rendah *ESG risk rating* yang diperoleh maka semakin kecil risiko keberlanjutan yang ditanggung perusahaan.¹² Peningkatan *ESG risk rating* dapat disebabkan oleh lemahnya pengelolaan isu lingkungan seperti emisi karbon dan limbah, isu sosial seperti keselamatan kerja dan hak karyawan, serta kelemahan dalam tata kelola seperti rendahnya independensi dewan komisaris. Sebaliknya, penurunan *ESG risk rating* menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memperkuat kebijakan keberlanjutan dan memperbaiki sistem pengawasan serta transparansi pelaporan. Haryono dan Arifianto menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan dalam menurunkan risiko ESG sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola berkelanjutan, sedangkan kurangnya pengawasan dan lemahnya implementasi ESG justru meningkatkan eksposur risiko keberlanjutan.¹³

¹² Sustainalytics, *ESG Risk Ratings Methodology* (2023), hlm. 5–6, diakses 23 Juni 2025, <https://www.sustainalytics.com/esg-rating>.

¹³ Haryono, S., & Arifianto, M., “Corporate Sustainability and Risk Management: The Effect of ESG Practices on Firm Risk in ASEAN Markets”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.9744/jaki.20.2.145-162>.

Secara umum, faktor internal perusahaan seperti struktur tata kelola, strategi tanggung jawab sosial perusahaan, kebijakan lingkungan, ukuran dan kompleksitas organisasi, hingga profil keuangan seperti *leverage* dan likuiditas. Misalnya, perusahaan dengan sistem tata kelola yang kuat dan struktur dewan yang transparan cenderung mendorong kebijakan keberlanjutan yang lebih proaktif. Begitu pula, perusahaan berskala besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk menjalankan program ESG secara sistematis.¹⁴

Selain itu, faktor eksternal seperti tuntutan transparansi dari investor institusional, regulasi pemerintah, dan harapan konsumen terhadap etika bisnis ikut memperkuat peran ESG dalam strategi perusahaan. Dorongan ini menjadi pengelolaan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola sebagai aspek penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan.¹⁵

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya. Menurut Carroll, CSR meliputi empat dimensi, yaitu tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropi.¹⁶ Pelaksanaan CSR yang terarah dan transparan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola isu keberlanjutan secara proaktif, sehingga dapat menurunkan *Environmental*,

¹⁴ Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, dan George Serafeim, "The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance," *Management Science* 60, no. 11 (2014), hal. 2843–2844, <https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984>.

¹⁵ R. G. Eccles dan S. Klimenko, "The Investor Revolution: Shareholders Are Getting Serious About Sustainability," *Harvard Business Review* 97 (Mei–Juni 2019), hal. 108–110.

¹⁶ Archie B. Carroll, "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders," *Business Horizons* 34, no. 4 (1991), hal. 39–48.

Social, and Governance (ESG) risk rating dengan mengurangi eksposur terhadap risiko sosial dan lingkungan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya kapasitas operasional dan sumber daya yang dimiliki, yang umumnya diukur melalui total aset, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan berskala besar cenderung memiliki kemampuan lebih kuat dalam menyusun laporan keberlanjutan, menerapkan kebijakan ramah lingkungan, serta merespons tekanan dari pemangku kepentingan.¹⁷ Dengan kapasitas tersebut, perusahaan biasanya lebih siap dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko keberlanjutan yang dapat berdampak pada penurunan *ESG risk rating*.

Sementara itu, independensi dewan komisaris mencerminkan kemampuan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk manajemen maupun pemegang saham utama.¹⁸ Dewan komisaris yang independen berperan penting dalam memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* berjalan efektif, mendorong transparansi, serta memperkuat akuntabilitas perusahaan.⁵ Dengan demikian, tingkat independensi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kebijakan keberlanjutan dan pengelolaan risiko ESG perusahaan.

¹⁷ Chung Chen dan Lee Metcalf, "Size as a Determinant of Corporate Social Performance: A Meta-Analytic Review," *Academy of Management Journal* 23, no. 1 (1980), hal. 77–85.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, 2014.

Penelitian oleh Ayad, Khan, dan Issa meneliti hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan risiko ekuitas yang mencakup risiko keberlanjutan secara global. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif melaksanakan dan mengungkapkan kegiatan CSR dipersepsikan memiliki risiko ekuitas lebih rendah.¹⁹ Sila dan Cek meneliti pengaruh dimensi ESG terhadap kinerja ekonomi perusahaan di Jepang. Mereka menemukan bahwa struktur dan karakteristik dewan direksi, terutama keberagaman dan tingkat independensi, berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan ESG dan mengurangi risiko keberlanjutan.²⁰ Sementara ukuran perusahaan, Zhao dan Wang melakukan studi terhadap perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tiongkok dan menemukan bahwa perusahaan berskala besar lebih mampu mengelola risiko keberlanjutan dengan baik, karena kapasitas sumber daya, tuntutan transparansi, dan tekanan regulasi yang lebih tinggi mendorong peningkatan kinerja ESG dan penurunan ESG *risk rating*.²¹

Sejalan dengan temuan internasional tersebut, penelitian mengenai ESG *risk rating* di Indonesia masih tergolong terbatas dan baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada ESG *disclosure* atau kinerja keberlanjutan secara umum, bukan pada pengukuran

¹⁹ M. Ayad, M. Khan, dan M. Issa, "Does Corporate Social Responsibility Impact Equity Risk? International Evidence," *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 59, 2022, hal. 1231–1260.

²⁰ Veysel Sila dan Koray Cek, "The Impact of Environmental, Social and Governance Dimensions on Economic Performance: Evidence from Japan," *Kyoto Economic Review* 86, no. 2 (2017), hal. 234–252.

²¹ Y. Zhao dan J. Wang, "Does Firm Size Matter for ESG Risk? Cross-Sectional Evidence from the Banking Industry," *Sustainability*, Vol. 15, No. 2, 2023, hal. 679.

risiko keberlanjutan.²² Maulana menemukan bahwa ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh terhadap ESG *risk rating* pada perusahaan publik Indonesia.²³ Wisanggeni dan Rahmawati juga menunjukkan bahwa ESG *risk rating* mulai diperhitungkan dalam pengambilan keputusan strategis meskipun belum berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan.²⁴

Seiring meningkatnya fokus global terhadap keberlanjutan, ESG *risk rating* menjadi indikator penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penelitian internasional maupun lokal sebelumnya menunjukkan bahwa faktor internal seperti pengungkapan CSR, ukuran perusahaan, dan karakteristik dewan direksi berperan signifikan dalam memengaruhi risiko keberlanjutan. Di Indonesia, penilaian ini semakin relevan, terutama bagi perusahaan yang tergabung dalam indeks IDX ESG *Leaders*. Meskipun demikian, sebagian besar studi masih mengkaji faktor-faktor ini secara terpisah atau hanya fokus pada ESG disclosure, sehingga analisis yang menguji pengaruh simultan CSR, ukuran perusahaan, dan karakteristik dewan terhadap ESG Risk Rating masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian yang penting untuk diteliti, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, agar

²² Sari, N. W. D. P., “Analisis Hubungan Good Corporate Governance dengan ESG Rating Perusahaan di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Universitas Dhyana Pura*, 11(2), 2023.

²³ Maulana, A. R., “ESG Risk Determinant Factors: Study on Indonesia Listed Firm”, *Wahana Akuntansi*, 18(2), 2023.

²⁴ Wisanggeni, N. U. B., & Rahmawati, I. Y., “The Effect of ESG Risk Ratings, Board Size and Gender Diversity on Financial Performance”, *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 21(7), 2024.

perusahaan dapat memahami faktor-faktor internal yang secara nyata memengaruhi risiko keberlanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan gambaran empiris mengenai determinan ESG *risk rating*. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat strategi keberlanjutan perusahaan sekaligus memperkuat literatur dalam konteks nasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berjudul “***Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, dan Independensi Dewan Komisaris terhadap Environmental, Social, and Governance Risk Rating (Studi Perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX ESG Leaders Tahun 2022-2024).***”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

1. Identifikasi Masalah

Peningkatan suhu global, pencairan es kutub, dan kenaikan permukaan laut menunjukkan bahwa risiko keberlanjutan kini menjadi kenyataan yang harus direspons secara strategis oleh dunia usaha. ESG *risk rating* menjadi indikator penting untuk menilai seberapa besar risiko keberlanjutan yang belum dikelola perusahaan. Namun, nilai ESG *risk rating* antar perusahaan, termasuk yang tergabung dalam IDX ESG *Leaders*, masih bervariasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor internal yang memengaruhi, seperti praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris. Meski

diyakini berpengaruh, kajian empiris yang menguji pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap ESG *risk rating* di Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

2. Batasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data sampel yang hanya mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Indeks IDX ESG *Leaders* pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis laporan keuangan dan laporan keberlanjutan yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap ESG *Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX ESG *Leaders* tahun 2022-2024?
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas terhadap ESG *Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX ESG *Leaders* tahun 2022-2024?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap ESG *Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks IDX ESG *Leaders* tahun 2022-2024?

4. Bagaimana pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks *IDX ESG Leaders* tahun 2022-2024?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks *IDX ESG Leaders* tahun 2022-2024.
2. Menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), terhadap *ESG Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks *IDX ESG Leaders* tahun 2022-2024.
3. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *ESG Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks *IDX ESG Leaders* tahun 2022-2024.
4. Menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk Rating* perusahaan yang terdaftar di Indeks *IDX ESG Leaders* tahun 2022-2024.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk*

Rating, serta mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah secara sistematis.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain, khususnya dalam pengembangan studi terkait akuntansi syariah dan keberlanjutan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menyusun strategi keberlanjutan yang efektif. Temuan mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk Rating* dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja ESG serta mengelola risiko keberlanjutan secara lebih optimal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan awal dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap *ESG Risk Rating*, baik dalam konteks sektor industri maupun tahun pengamatan yang berbeda.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian Penelitian ini dibatasi pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks *IDX ESG Leaders* di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR), ukuran perusahaan, dan independensi dewan komisaris terhadap *ESG risk rating*, di mana ketiga variabel tersebut berperan sebagai variabel independen, dan *ESG risk rating* sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan pendekatan time-lag, yaitu dengan memanfaatkan data laporan keuangan tahun sebelumnya untuk menjelaskan *ESG risk rating* pada tahun berjalan, sesuai metode penilaian yang diterapkan oleh *Sustainalytics*.

G. Penegasan Variabel

1. Penegasan Konseptual

a. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR dilakukan melalui perilaku yang etis dan transparan serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 menekankan bahwa CSR harus menjadi bagian dari strategi inti organisasi dan mencakup tujuh isu utama: tata kelola organisasi, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi

yang adil, isu konsumen, serta keterlibatan dan pengembangan masyarakat.²⁵

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aktiva, penjualan, atau jumlah tenaga kerja, yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mengelola operasi bisnis dan risiko keuangan. Perusahaan yang lebih besar umumnya memiliki struktur organisasi lebih kompleks, akses pembiayaan lebih luas, dan pengaruh pasar yang lebih besar.²⁶

c. Independensi dewan komisaris

Independensi dewan komisaris merupakan kondisi di mana anggota dewan komisaris mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara objektif, bebas dari intervensi atau pengaruh pihak manapun, termasuk pemegang saham mayoritas dan manajemen. Independensi ini penting agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan mendukung penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).²⁷

²⁵ International Organization for Standardization (ISO), *ISO 26000: Guidance on Social Responsibility* (Geneva: ISO, 2010), hal. 3–4.

²⁶ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Fundamentals of Financial Management*, ed. ke-13 (South-Western Cengage Learning, 2010), hal. 164–165.

²⁷ Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, 2006.

d. *ESG Risk Rating*

ESG Risk Rating adalah ukuran tingkat risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*) yang bersifat material dan belum dikelola secara memadai oleh perusahaan. *ESG Risk Rating* menilai eksposur perusahaan terhadap risiko ESG serta kemampuan manajemen dalam mengatasinya. Semakin rendah nilai rating, semakin kecil risiko keberlanjutan yang melekat pada perusahaan.²⁸

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, mencakup empat variabel. *ESG Risk Rating* diukur berdasarkan skor resmi dari *Sustainalytics* yang menunjukkan tingkat risiko keberlanjutan perusahaan, semakin rendah skor, semakin baik. *Corporate Social Responsibility* (CSR) diukur menggunakan indeks pengungkapan CSR berbasis standar GRI melalui analisis isi laporan tahunan. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan pada akhir tahun, sebagai indikator besarnya perusahaan. Sementara itu, independensi dewan komisaris diukur melalui proporsi dewan komisaris independen sebagaimana tercantum dalam laporan tahunan atau laporan tata kelola perusahaan.

²⁸ Sustainalytics, *ESG Risk Ratings Methodology* (2020), diakses 23 Juni 2025, <https://www.sustainalytics.com/esg-rating>.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun agar memberikan gambaran yang terstruktur dan sistematis mengenai isi dari skripsi. Adapun bagian dari tiap bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjadi bagian pembuka yang menyajikan gambaran singkat mengenai topik yang diteliti. Isi bab mencakup latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup serta batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, yaitu *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, independensi dewan komisaris, serta *ESG risk rating*. Selain itu, bab ini juga memuat pembahasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, populasi serta sampel penelitian, sumber data, variabel, dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrument penelitian, hingga metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, termasuk hasil pengujian asumsi klasik, nalaisi regresi, dan pengujian hipotesis.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini berisi interpretasi hasil penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan peneliti berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pihak terkait berdasarkan hasil temuan penelitian, serta saran untuk peneliti lain untuk menambah atau mengembangkan hasil temuan penelitian.